

- RINCIAN KEGIATAN DAN TARGET

Setelah perubahan :

Visi : Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera Dan Berakhlak

Misi : 3 Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan

Tujuan RPJMD : Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Inklusif, Mandiri Dan Berkelanjutan

Indikator Tujuan RPJMD : 1. Angka Pertumbuhan Ekonomi
2. Angka Kemiskinan

Sasaran RPJM : 1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Mandiri
2. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Lokal

Indikator Sasaran RPJMD : 1. Pertumbuhan PDRB Unggulan (Pertanian, Industri, Perdagangan)
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						FORMULASI HITUNG
			2021		2022		2023		
			TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
TUJUAN OPD									
Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal ⁸	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,56		4,32		4,08		(Jumlah pengangguran / Jumlah Angkatan kerja) x 100%
SASARAN OPD									TPAK = a/b x 100%
Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70,00		71,00		72,00		a = Jumlah Angkatan kerja b = Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80,01	4.419.777.421	83,00	4.719.220.028	86,00	4.819.220.028	
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (%)	%	77,00		88,00		90,00		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								Jumah gaji ASN yang dibayarkan / Jumah Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN x 100
	Presentase gaji dan tunjangan yang dibayarkan	%	100,00	3.790.333.836	100,00	3.790.333.836	100,00	3.790.333.836	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	14 Bulan	3.790.333.836	14 Bulan	3.790.333.836	14 Bulan	3.790.333.836	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah								Sudah Cukup Jelas
	Presentase Terpenuhinya kebutuhan administrasi dan pendukung operasional perkantoran	%	100	177.030.529	100	472.873.746	100	472.873.746	

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.018.730	1	6.411.181	1	6.411.181	Sudah Cukup Jelas
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	88.150.214	3	181.595.202	3	181.595.202	Sudah Cukup Jelas
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	-	1	6.767.860	1	6.767.860	Sudah Cukup Jelas
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	9.062.460	2	23.405.503	2	23.405.503	Sudah Cukup Jelas
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	16.030.125	2	17.500.000	2	17.500.000	Sudah Cukup Jelas
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	24	3.300.00	24	3.180.000	24	3.180.000	Sudah Cukup Jelas
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	130	57.469.000	530	234.014.000	675	253.814.000	Sudah Cukup Jelas
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	0	-	100	19.800.000	0	-	Sudah Cukup Jelas
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	-	1	19.800.000	0	-	Sudah Cukup Jelas
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	355.422.176	100	309.242.006	100	309.242.006	Sudah Cukup Jelas
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	60.671.428	48	54.180.636	96	54.180.636	Sudah Cukup Jelas
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	31.974.695	0	-	0	-	Sudah Cukup Jelas
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	21	262.776.053	21	255.061.370	33	255.061.370	Sudah Cukup Jelas
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	96.990.880	100	123.970.440	100	123.970.440	Sudah Cukup Jelas
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Umum Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	13	63.990.880	13	72.093.890	13	72.093.890	Sudah Cukup Jelas
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	-	35	18.876.550	49	18.876.550	Sudah Cukup Jelas
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	33.000.000	1	33.000.000	1	33.000.000	Sudah Cukup Jelas

	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Laporan Kinerja SKPD yang tercapai	%	100	-	100	3,000,000	100	103,000,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	13	-	13	103.000.000	14	103.000.000	Jumlah realisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah / Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pd thn n x 100
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase lulusan pelatihan kerja yang bekerja	%	76	694,130,994	77	1,393,483,653	78	1,781,198,505	Jumlah lulusan pelatihan kerja yang bekerja / Jumlah lulusan pelatihan kerja) x 100%
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	orang	128 Orang		128 Orang		128 Orang		Jumlah Peserta Pelatihan yang berkompeten pada tahun n
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	orang	128 Orang	574.130.994	128 Orang	1.203.483.653	128 Orang	1.541.198.505	Jumlah Peserta Pelatihan yang bersertifikasi pada Tahun n
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Persentase Lembaga Pelatihan yang Terakreditasi	%	30%		32%		35%		Presentase LPK yang terakreditasi/ jumlah LPK Th n x 100
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lemba ga	8	50.000.000	10	90.000.000	12	100.000.000	Jumlah LPK yang dibina/jumlah LPK Th n x 100
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pembinaan Perusahaan	%	4		6		8		Jml perusahaan yang dibina produktifitasnya/ jumlah target perusahaan pada tahun n x 100
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Dokumen	1 (35) persh	70.000.000	1 (35) persh	100.000.000	1 (35) persh	140.000.000	Jumlah perusahaan yang dibina pada tahun n
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	76	298.553.136	77	369.452.040	78	377.517.538	(Pencari kerja yang ditempatkan / Jumlah pencari kerja) x 100%
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Tenaga Kerja yang dilayani Bimbingan Jabatan	Orang	2.750 Orang		3.000 Orang		3.250 Orang		Jumlah Tenaga Kerja yang dilayani Bimbinagan jabatan (AKAL,AKAD, AKAN) pada tahun n.
	Penyediaan Sumber daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang mendapatkan Pelatihan Melalui Bimntek dan lain lain untuk Peningkatakn Kompetensi.	orang	0	0	0	0	75	50.691.000	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang mendapatkan Pelatihan
	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKD dan AKL	orang	2000	235.169.251	2100	286.068.440	2200	193.895.188	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan sesuai prosedur pada tahun n.
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja.	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan jabatan.	Orang	0	0	0	0	500	47.543.750	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan jabatan pada tahun n

	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang diberdayakan	orang	100		200		200		Jumlah PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang diberdayakan dalam tahun n
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang diberdayakan	orang	100	63.383.885	200	83.383.600	200	85.387.600	Jumlah PMI purna penempatan yang dibina dalam pengelolaan keuangan pada tahun n.
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Angka sengketa Perusahaan Pekerja Per tahun	%	80	300.000.000	80	307.500.000	80	315.187.500	Jumlah sengketa pengusaha pekerja Per Tahun /Jumlah Perusahaan)x100 %
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	5		5		5		Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan yang layak/jumlah perusahaan yang ada x 100%
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	10	55.000.000	10	60.000.000	10	61.000.000	Jumlah syarat Kerja dan PP yang disyahkan dan PKB yang didaftarkan /Realisasi/target x100)
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	1 (605) Persh.	72.000.000	1 (608) Persh	73.000.000	1 (610) Persh	74.000.000	Jumlah laporan perusahaan yang telah mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang akhirnya di dokumenkan menjadi 1 laporan. (Jumlah Perusahaan Peserta BPJS.
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan	%	100		100		100		Jumlah perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan /Jumlah perselisihan hubungan industrial yang tercatat x 100
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	10	173.000.000	10	174.500.000	10	180.187.500	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang dapat diselesaikan (Jumlah Perkara yang diselesaikan /Jumlah target x 100)
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Persentase transmigran umum yang berhasil	%	100%	62.029.708	100%	63.654.886	100%	65.246.259	Jumlah calon transmigran umum yang berhasil diberangkatkan / jumlah calon transmigran umum yang diseleksi) x 100%
	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Transmigran yang diseleksi	KK	5 KK		7 KK		10 KK		Jumlah calon Transmigrasi yang diseleksi /Jumlah calon Transmigrasi yang terdaftar x 100

		Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga yang Dibina	KK	2 KK	62.029.708	2 KK	63.654.886	2 KK	65.246.259	Jumlah KK sebagai calon Transmirasi yang diberangkatkan.
TUJUAN OPD											<u>PDRBt - PDRBt-1</u> x 100 %
Meningkatnya PDRB Sektor Industri.			Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB.	%	11.80		11.85		11.90		PDRBt-1
SASARAN OPD											
Meningkatnya Usaha Industri Kecil dan Menengah			Persentase Peningkatan IKM	%	3,10%		3,19%		3,22%		(IKM Tahun n - IKM tahun n-1/ IKM tahun n-1) x 100%
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			Jumlah rencana pembangunan industri	Dokumen	1	74.156.355	1	76.010.264	1	77.910.520	Jumlah Rencana Pembangunan Industri yang di lanjutkan.
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1		1		1		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan yang tersusun.
			Jumlah IKM yang mampu mengrmbangkan Produk khas Daerah.	IKM	50		50		50		
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	0	-	1	21.555.372	1	21.555.372	Jumlah Dokumen NA RPIK dan RPIK
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	1	50.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	Jumlah Dokumen hasil kordinasi pada tahun n
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1 (50 IKM)	24.156.355	1 (50 IKM)	34.454.892	1 (50 IKM)	36.355.148	Jumlah Dokumen hasil kordinasi pada tahun n
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			Persentase IKM yang memanfaatkan SIINas	%	6,02	42.109.055	12,04	43.161.781	18,07	44.240.826	Jumlah IKM yang memanfaatkan SIINas/ Jumlah IKM yang dilakukan pendampingan untuk memanfaatkan SIINas x 100
Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			Persentase updating Data Sistem Informasi Industri	%	100		100		100		Jumlah IKM yang Menyampaikan laporan ke SIINas/Jumlah target IKM yang belum Menyampaikan laporan ke SIINas x 100
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	1 (50 IKM)	42.109.055	1 (50 IKM)	43.161.781	1 (50 IKM)	44.240.826	Jumlah Dokumen pada tahun n (yang mengajukan lebih dari 1 akan tetapi dari beberapa hasil dokumen ini yang akhirnya didokumenkan menjadi 1 Dokumen).

PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA		Persentase IKM yang mendapatkan ijin usaha	%	6,02	51.920.590	12,04	53.218.605	18,07	54.549.070	(Jumlah IKM yang mendapatkan Ijin Usaha IUI, IPUI, IUKI dan IPKI , yang direkomendasi / Jumlah IKM yang dilakukan pendampingan x 100%
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	IKM	50		50		50		Jumlah IKM yang mendapat Rekomendasi IUI, IPUI, IUKI dan IPKI pada tahun n
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Dokumen	1	51.920.590	1	53.218.605	1	54.549.070	Jumlah Dokumen pada tahun n (yang mengajukan lebih dari 1 akan tetapi dari beberapa hasil pengajuan verifikasi ini yang akhirnya didokumenkan menjadi 1 Dokumen).
	Jumlah				5,942,677,259		7,025,701,257		7,535,070,246	

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MADIUN**



HERU KUNCORO, S.Sos. M.Si.
Pemimpin Tingkat I
NIP. 19700316 199103 1 004